

**EFEKTIVITAS PASAL 16 AYAT 1 HURUF N
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS
MENGENAI KEWAJIBAN NOTARIS MENERIMA
CALON NOTARIS MAGANG GUNA MENINGKATKAN
KOMPETENSI CALON NOTARIS
(Studi di Kota Batu)**

JURNAL



**Oleh:
SUBHAN ROLLY SAHRIAL
NIM. 126010200111012**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2014**

**EFEKTIVITAS PASAL 16 AYAT 1 HURUF N
UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG JABATAN NOTARIS
MENGENAI KEWAJIBAN NOTARIS MENERIMA
CALON NOTARIS MAGANG GUNA MENINGKATKAN
KOMPETENSI CALON NOTARIS
(Studi di Kota Batu)**

Subhan Rolly Sahrial¹, Rachmad Syafaat², Chusen Bisri³

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Jl. MT. Haryono 169, Malang, 65145, Telp. (0341) 553898, Fax. (0341) 566505.

Email: babacosimomondo@yahoo.co.id

Abstract

Internship as one of the requirements for notary candidates to be appointed as a notary has a crucial function, so therefore need to gain the attention of many people, especially in this case is a senior notary in order to educate and develop the ability of candidates Notary. This paper aims to examine and analyze the effectiveness of Article 16 Paragraph 1 Letter n Law on Notary in Batu, the Notary accept liability intern candidate notary notary in order to improve the competence of the candidate as well as to examine and analyze the sanctions provided by the Regional Supervisory Council to the Notary notary candidates who do not receive an internship, through legal methods of social research, conducted with the socio-juridical approach. Based on the survey results revealed that the article is not effective application in Batu, which is caused by several factors namely, the substance of the legal factors, legal and cultural structures, while the Regional Supervisory Council can impose sanctions on notary who refuses to accept an internship with reference to the provisions of Article 16, paragraph 11 Law on Notary.

Key words: *effective, internships, notary*

Abstrak

Magang sebagai salah satu syarat bagi calon notaris untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris memiliki fungsi yang krusial, sehingga karenanya perlu memperoleh perhatian banyak pihak khususnya dalam hal ini adalah Notaris senior dalam rangka mendidik dan mengembangkan kemampuan calon Notaris. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas Pasal 16 Ayat 1

¹ Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

² Dosen Pascasarjana, Metode Penelitian Dan Penalaran Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

³ Dosen Pascasarjana, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya.

Huruf n Undang-undang tentang Jabatan Notaris di Kota Batu, mengenai kewajiban Notaris menerima calon notaris magang guna meningkatkan kompetensi calon notaris serta untuk mengkaji dan menganalisis sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah kepada Notaris yang tidak menerima calon notaris magang, melalui metode *social legal research*, yang dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pasal tersebut tidak efektif penerapannya di Kota Batu, yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni, faktor substansi hukum, struktur hukum dan budaya, sedangkan Majelis Pengawas Daerah dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang menolak menerima magang dengan mengacu pada ketentuan Pasal 16 ayat 11 Undang-undang tentang Jabatan Notaris.

Kata kunci: efektif, magang, notaris

Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia.

Mewujudkan tujuan negara dalam menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum tersebut dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan dan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat dan ditunjuk secara sah oleh pemerintah yang diberi wewenang untuk membuat akta autentik dari suatu perbuatan hukum maupun peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat.

Sejarah Notaris di Indonesia sendiri tidak bisa lepas dari sejarah Notaris di Belanda dan Prancis, karena bersumber pada hukum Notaris di Belanda atas dasar azas *concordantie*, yang mengadopsi ketentuan-ketentuan dari hukum notaris di Prancis (*Loi Organique du notariat*).⁴

Meningkatkan profesi Notaris secara profesional dan berkualitas baik dalam jabatannya sebagai abdi negara ataupun sebagai salah satu orang yang melayani masyarakat dalam bidang hukum, maka diharapkan para notaris bisa membagi pengetahuan hukum yang telah dipelajari selama menjalani praktik jabatannya, salah satunya kepada calon notaris yang akan berpraktik yaitu dengan

⁴ R.Soegondo Notodisoerjo, **Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993. hlm. 22.

cara magang di kantor notaris yang sudah berpraktik selama 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut baik atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan, hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat 1 Huruf n Undang-Undang Jabatan Notaris.

Pasal tersebut sangat jelas disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, seorang notaris wajib menerima magang calon notaris, berarti seorang notaris yang telah berpraktik tidak boleh menolak magang yang diajukan oleh seorang calon notaris magang. Melalui program magang berarti telah terjadi regenerasi di dunia kenotariatan karena salah satu syarat menjadi notaris adalah sudah melalui tahap magang selama 24 (dua puluh empat) bulan. Jika seorang notaris menolak kehadiran calon notaris untuk magang di kantornya berarti secara tidak langsung dia menghentikan eksistensi praktik kenotariatan.⁵

Berbicara tentang penolakan yang dilakukan oleh Notaris yang berpraktik terhadap calon notaris magang karena tidak tegasnya sanksi yang mengatur tentang penolakan itu, bahkan di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris pasal 16 huruf m tidak memberikan sanksi apapun terhadap penolakan magang calon notaris, padahal dalam undang-undang tersebut hanya mewajibkan calon notaris magang selama 12 (dua belas) bulan saja. Meskipun kewajiban tersebut tanpa sanksi secara moral ketentuan tersebut wajib dilaksanakan oleh notaris, dan harus di ingat semua notaris yang menjalankan tugas jabatannya sebagai notaris pernah magang pada notaris sebelum yang bersangkutan diangkat sebagai notaris.⁶

Berangkat dari penolakan magang bagi calon notaris dan waktu magang yang hanya 12 (dua belas) bulan tersebut dianggap belum mampu melahirkan calon notaris yang handal, luhur, beretika dan profesional. Maka dibuatlah perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris, salah satu pasal yang dirubah tersebut adalah pasal 3 huruf f (Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004) dimana waktu magang hanya 12 (dua belas) bulan, setelah perubahan menjadi 24 (dua puluh empat) bulan (Undang-Undang Jabatan Notaris.

⁵ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, **Ke Notaris**, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009. hlm. 44.

⁶ Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Reflika Aditama, Bandung , 2008, hlm. 88.

Pada dasarnya bukan hanya masalah waktu magang yang menjadi tolak ukur atau parameter yang bisa dijadikan acuan bahwa seorang calon notaris sudah dianggap mampu menjadi seorang notaris yang profesional, tetapi tergantung bagaimana seorang calon notaris mampu menyerap ilmu atau pengetahuan yang didapatnya selama proses magang, di samping ketersediaan pengetahuan dan informasi yang terdapat di tempat magang, karena seyogyanya Notaris yang dijadikan rujukan magang merupakan Notaris yang telah memiliki pengalaman yang cukup sehingga dianggap memiliki kemampuan lebih yang bermanfaat bagi calon Notaris.

Atas permasalahan tersebut organisasi notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia (INI), mengusulkan untuk mengadakan pelaksanaan magang bersama yang wajib diikuti oleh calon notaris selain magang di kantor notaris atas inisiatif sendiri. Dimana dengan diadakannya magang bersama ini selain tujuan untuk menghasilkan notaris yang siap pakai dan profesional juga untuk meningkatkan penguasaan, keahlian, dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris serta meningkatkan pemahaman atas Kode Etik Notaris maupun aplikasinya⁷.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau sering disebut penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang melihat langsung kenyataan di lapangan, jenis penelitian ini memiliki sifat dan karakter yang menampakkan kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan kenyataan yang ada di masyarakat dengan melihat permasalahan banyaknya calon notaris yang tidak mendapatkan tempat magang di kantor notaris senior yang diharapkan dapat melahirkan calon notaris yang handal, luhur, beretika dan profesional.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dipergunakan untuk melihat kesenjangan antara hukum yang berlaku dengan praktik di lapangan tentang penerimaan calon notaris magang.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis,

⁷ www.hukumonline.com/calon-notaris-wajib-magang-bersama, diakses pada tanggal 22 april 2014 jam 15.57 WIB

yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Berdasarkan penelitian ini, maka permasalahan yang di angkat adalah Bagaimana efektifitas pasal 16 ayat 1 Huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris menerima calon notaris magang guna meningkatkan kompetensi calon notaris?; Apa sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) kepada Notaris yang tidak menerima calon Notaris magang?

Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi

Kota Batu merupakan salah satu kota yang baru terbentuk pada tahun 2001 sebagai pemekaran dari Kabupaten Malang yaitu dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Batu, tertanggal 21 Juni 2001. Sebelumnya wilayah kota Batu merupakan bagian Sub Satuan Wilayah Pengembangan 1 (SSWP 1) Malang Utara.

Secara atronomis Kota Batu terletak pada posisi 112°17'10,90"-122°57'11" Bujur Timur dan 7°44'55,11"-8°26'35,45 Lintang Selatan. Batas administratif wilayahnya dapat digambarkan sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kecamatan Prigen, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan.

Sebelah Timur : Kecamatan Karang Ploso dan Kecamatan Dau Kabupaten Malang.

Sebelah Selatan: Kecamatan Dau dan Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang dan Kabupaten Blitar.

Sebelah Barat : Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.

Secara administratif, kota Batu dibagi menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu Kecamatan Batu, Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Bumiaji yang terinci dalam 20 (dua puluh) Desa, 4 (empat) Kelurahan, 226 Rukun Warga dan 1.059 Rukun Tetangga.

Luas wilayah Kota Batu 19.908,72 Ha (199,08 km²), yang meliputi

Kecamatan Batu seluas 4.545,81 Ha (45,45 km²), Kecamatan Junrejo seluas 2.565,02 Ha (25,65 km²) dan Kecamatan Bumiaji seluas 12.797,89 Ha (127,97 km²). Jumlah Penduduk kota Batu pada tahun 2003 yaitu 168.155 jiwa dan 214.321 jiwa pada tahun 2013. Kepadatan penduduk kota Batu mencapai 1076 jiwa/km².⁸

Sampai saat ini Notaris yang berpraktik di Kota Batu ada 14 (empat belas) orang Notaris, sedangkan formasi yang dibutuhkan oleh Administrasi Hukum Umum (AHU) sebanyak 17 (tujuh belas) orang Notaris, berarti formasi Notaris di Kota Batu masih membutuhkan sebanyak 3 (tiga) orang Notaris lagi untuk melengkapi formasi Notaris di Kota Batu.⁹

Mengenai formasi jabatan Notaris harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, seperti yang tertuang dalam Pasal 22, yang berbunyi :

- (1) Formasi Jabatan Notaris ditetapkan berdasarkan :
 - a. kegiatan dunia usaha;
 - b. jumlah penduduk; dan/atau
 - c. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.
- (2) Formasi jabatan Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman untuk menentukan kategori wilayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Formasi Jabatan Notaris dan penentuan kategori daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dan 2 (dua) diatur dengan peraturan menteri.

B. Efektivitas Pasal 16 Ayat 1 Huruf N Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai kewajiban Notaris menerima calon Notaris magang guna meningkatkan kompetensi calon Notaris

Salah satu kewajiban Notaris adalah menerima magang bagi calon Notaris, seperti yang telah tertuang dalam Pasal 16 ayat 1 huruf n Undang-

⁸ www.batukota.bps.go.id, diakses pada tanggal 3 juli 2014 jam 12.15 WIB

⁹ www.ahu.web.id/formasi-notaris, diakses pada tanggal 5 juli 2014, pukul 01.09 WIB

undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena merupakan kewajiban jadi harus dilaksanakan oleh seorang Notaris, dan bagi calon Notaris magang merupakan salah satu syarat untuk diangkatnya menjadi seorang Notaris.

Karena menerima magang merupakan salah satu kewajiban Notaris, jadi tidak ada alasan untuk menolak magang calon Notaris, karena apabila ada Notaris yang menolak menerima calon Notaris magang, secara tidak langsung Notaris tersebut telah menghentikan eksistensi lahirnya Notaris baru dan berarti seorang Notaris telah melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang jabatan Notaris.

Dari semua kewajiban Notaris seperti yang tertuang dalam pasal 16 Undang-undang Jabatan Notaris, hanya yang berkaitan dengan magang yang sanksinya tidak berat, karena tidak dilanjutkan dengan sanksi-sanksi yang lain, sanksi tentang pelanggaran yang berkaitan dengan magang hanya mendapatkan sanksi berupa peringatan tertulis, terdapat beberapa sanksi mengenai kewajiban Notaris apabila ada pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat 1 Undang-undang Jabatan Notaris, seperti :

Pasal 16 ayat 11 “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat¹⁰

Pasal 16 ayat 12, “Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada notaris”.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pasal 16 ayat 13, “Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis”.¹¹

Menurut Philipus M. Hadjon: “Sanksi merupakan alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang digunakan oleh penguasa sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan pada norma hukum administrasi”. Dengan demikian unsur-unsur sanksi, yaitu :

- a. Sebagai alat kekuasaan;
- b. Bersifat hukum publik;
- c. Digunakan oleh penguasa;
- d. Sebagai reaksi terhadap ketidakpatuhan.¹²

Sanksi terhadap Notaris ada 2 macam, yaitu :

1. Sanksi Perdata

Sanksi ini berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan akibat yang akan diterima Notaris atas tuntutan para penghadap jika akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau akta menjadi batal demi hukum.

Akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, karena melanggar ketentuan tertentu, akan terdegradasi nilai pembuktiannya menjadi mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.¹³

2. Sanksi administratif Sanksi ini berupa :

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Pemberhentian sementara;
- d. Pemberhentian dengan hormat;
- e. Pemberhentian tidak hormat.¹⁴

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

¹² Habib Adjie, **Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik**, Refika Aditama, Bandung. 2008, hlm 89

¹³ *Ibid.*, hlm 91

¹⁴ *Ibid.*, hlm 92

Dalam pasal 16 tersebut, jelas bisa dilihat karena itu suatu kewajiban, maka seorang Notaris tidak boleh melanggar atau menolak apa yang telah di perintahkan oleh undang-undang dalam memberikan jasa nya apabila diminta oleh yang berkepentingan, akan tetapi dalam dunia praktik ditemukan beberapa alasan, sehingga Notaris menolak untuk memberikan jasa nya, antara lain :

- a. Apabila Notaris sakit sehingga tidak dapat memberikan jasanya, jadi berhalangan karena fisik;
- b. Apabila Notaris tidak ada karena dalam masa cuti, jadi karena sebab yang sah;
- c. Apabila Notaris karena kesibukan pekerjaannya tidak dapat melayani orang lain;
- d. Apabila surat-surat yang diperlukan untuk membuat suatu akta, tidak diserahkan kepada Notaris;
- e. Apabila penghadap atau saksi instrumentair yang diajukan oleh penghadap tidak dikenal oleh Notaris atau tidak dapat diperkenalkan kepadanya;
- f. Apabila yang berkepentingan tidak mau membayar bea materai yang diwajibkan;
- g. Apabila pihak-pihak menghendaki bahwa Notaris membuat akta dalam bahasa yang tidak dikuasai olehnya, atau apabila orang yang menghadap berbicara dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh Notaris.¹⁵

Ada beberapa kewajiban Notaris tempat calon Notaris magang dalam melaksanakan masa magangnya, diantaranya :

1. Memberikan cukup kesempatan bekerja kepada peserta magang selama magang. Apabila peserta magang bekerja pada atau menjadi bagian dari persekutuan perdata suatu kantor Notaris, maka haruslah ditentukan Notaris mana yang bertanggung jawab untuk memberikan bimbingan dan keterangan lulus magang.
2. Memberikan bimbingan, tuntunan dan nasehat selama peserta magang menjalani magang.

¹⁵ R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. Cit*, hlm. 97-98

3. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta magang untuk belajar mengenai pekerjaan dan tugas seorang Notaris.
4. Memberikan kesempatan bagi peserta magang untuk dapat mengikuti kursus atau ujian yang berkaitan dan dalam rangka untuk memenuhi syarat pengangkatan sebagai Notaris.
5. Memberi kesempatan kepada peserta magang untuk menjadi Notaris pengganti apabila peserta magang tersebut dianggap telah mampu untuk melakukannya.
6. Menularkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki Notaris kepada peserta magang.
7. Memberitahukan kepada Ikatan Notaris Indonesia mengenai peserta magang yang magang di kantornya dalam waktu yang ditentukan oleh Ikatan Notaris Indonesia.
8. Memberikan keterangan lulus magang dalam bentuk yang ditentukan Ikatan Notaris Indonesia setelah peserta magang selesai dan telah memenuhi persyaratan magang yang ditentukan Ikatan Notaris Indonesia.¹⁶

Sedangkan bagi calon Notaris magang, ada beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan dalam menjalani masa magangnya di kantor Notaris, antara lain:

1. Bersikap sebagaimana layaknya seorang karyawan Notaris sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan kode etik Notaris.
2. Mengerjakan semua pekerjaan layaknya seorang Notaris seperti mengerjakan administrasi kantor Notaris, membuat renvoi, mempersiapkan akta, menjahit akta, memeriksa akta, menyelesaikan akta, menghadapi klien, bercakap-cakap melalui telepon yang berkaitan dengan pekerjaan di kantor Notaris dan sebagainya.
3. Mengerjakan pekerjaan kantor Notaris yang bersifat legal yang diberikan kepada peserta magang oleh Notaris tempat ia magang kecuali adanya alasan yang memadai.

¹⁶Sjaifurrachman, **Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta**, Mandar Maju, Bandung. 2011, hlm 92-93.

4. Mendengarkan petunjuk, bimbingan dan nasehat yang diberikan oleh Notaris tempat peserta magang menjalankan magang.¹⁷

Berkaitan dengan magang ini, karena masih merupakan tanggung jawab Organisasi Notaris untuk menentukan tempat magang yang tepat bagi calon Notaris magang, karena program magang merupakan salah satu cara untuk mengasah kemampuan dan keterampilan calon Notaris dalam praktik dengan tujuan untuk menjamin kualitas calon Notaris yang siap pakai sebelum diangkat menjadi Notaris.

Untuk mencapai sosok ideal seorang Notaris, ada lima faktor penentu yang hubungannya tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yaitu:

1. Penyelenggara pendidikan;
2. Personil penyelenggara pendidikan;
3. Kualitas materi atau bahan pelajaran;
4. Kualitas “bahan baku” siswa yang mendaftar;
5. Sistem dan metode pengajaran, pendidikan, dan pelatihan.¹⁸

Penolakan terhadap calon notaris magang yang dilakukan oleh beberapa Notaris di Kota Batu agar keberlangsungan di dunia Notaris tetap terjaga maka diperlukan campur tangan pemerintah sebagai pemberi wewenang kepada Notaris dalam bentuk Undang-undang sebagai pejabat umum yang bertujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa dan perbuatan hukum sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, dan dengan adanya kerjasama antara pemerintah, organisasi Notaris serta Notaris yang telah berpraktik maka bisa jadi untuk mengefektifkan pasal yang berkaitan dengan kewajiban Notaris menerima magang.

Beberapa kantor Notaris di Kota Batu, mereka sebenarnya setuju dengan adanya program magang di kantor tempat para Notaris berpraktik asal harus ada surat rekomendasi dari Organisasi Notaris, karena pada dasarnya para Notaris di Kota Batu mau menerima calon notaris magang di kantor mereka asal para calon Notaris magang mengikuti jam kerja di kantor Notaris, jadi semuanya sesuai dengan aturan yang ada di kantor, dengan beriskap seperti

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Loc. Cit.*

karyawan yang lain, hal ini dilakukan dengan alasan agar calon Notaris magang lebih siap dalam menghadapi dunia praktik Notaris nantinya setelah melalui tahap magang.¹⁹

Herlien Budiono, dalam makalahnya “beberapa catatan tentang magang” yang disampaikan dalam Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diperluas Ikatan Notaris Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta tanggal 30 juni 2009, halaman 2-3, untuk itu Notaris yang menerima magang bagi calon Notaris harus memenuhi kriteria, yaitu :

- 1) Telah menjalankan tugas jabatan Notaris sedikitnya selama dua tahun.
- 2) Terdaftar sebagai anggota Ikatan Notaris Indonesia (INI).
- 3) Mempunyai catatan yang baik dalam menjalankan jabatan Notaris, pada pada pengurus dan/atau dewan kehormatan Ikatan Notaris Indonesia maupun Majelis Pengawas Daerah.
- 4) Tidak sedang menjalani sanksi administrasi dan/atau tidak pernah dikenakan sanksi administrasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan keputusan kongres atau putusan dewan kehormatan Ikatan Notaris Indonesia, baik di tingkat daerah, wilayah, maupun pusat.
- 5) Tidak sedang dan/atau tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 6) Ditunjuk sebagai Notaris penerima magang oleh Ikatan Notaris Indonesia.
- 7) Notaris penerima magang wajib mentaati persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Organisasi, antara lain tentang pelaksanaan materi magang dan jadwalnya, melakukan bimbingan dan pembinaan, kesanggupan memberikan penilaian objektif dan jujur, bersedia adanya pelaksanaan pengawasan oleh organisasi, dan
- 8) Notaris penerima magang mempunyai ruangan kantor yang cukup untuk peserta magang dengan jumlah yang disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang tersedia.²⁰

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Lenny Wibowo (Notaris praktik di Kota Batu), pada tanggal 19 Juni 2014, data primer diolah.

²⁰ Sjaifurrachman, *Loc.Cit.*

C. Sanksi yang diberikan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD) kepada notaris yang tidak menerima calon notaris magang.

Peningkatan kualitas dari seorang notaris sangat penting untuk menjaga nama baik Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, namun tidak dapat dipungkiri seiring berjalan waktu, ada beberapa faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas hukum tentang pelaksanaan magang bagi calon Notaris pada kantor Notaris di Kota Batu, yaitu:

1. Substansi Hukum/ peraturan perundang-undangan.

Dalam hal yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan Notaris tentang kewajiban menerima Notaris magang dimana dalam praktik khususnya di Kota Batu masih banyak terjadi penolakan, hal ini disebabkan karena sanksi yang diberikan tidak terlalu tegas yaitu hanya dikenai sanksi peringatan tertulis.

Praktiknya masih banyak ditemukan tentang penolakan yang dilakukan Notaris terhadap calon Notaris magang dengan berbagai alasan mulai dari tidak adanya waktu untuk memberikan pembelajaran dari seorang Notaris kepada calon notaris magang dikarenakan kesibukan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, kemudian adanya alasan karena ruang/tempat kerja Notaris tidak terlalu besar jadi tidak cukup menampung calon notaris magang, kemudian adanya alasan karena akta yang dibuat di kantor Notaris tidak terlalu banyak.²¹

Walaupun dalam Undang-Undang Jabatan Notaris salah satu kewajiban Notaris adalah menerima calon Notaris magang tetapi dalam praktik sangat berbeda meskipun sebenarnya semua notaris menyadari bahwa apa yang mereka lakukan itu merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga menyebabkan pasal yang berhubungan dengan magang tidak efektif yang dikarenakan sanksi yang diberikan seperti dalam Undang-undang jabatan Notaris mengenai magang tidak dapat memberikan efek jera.²²

²¹ Hasil Wawancara dengan Suyati Harini (Notaris praktik di Kota Batu), pada tanggal 19 Juni 2014, data primer diolah.

²² Hasil Wawancara dengan Itta Andrijani (Ketua Ikatan Notaris Indonesia Daerah Malang), tanggal 16 Juli 2014 data primer diolah

Menurut beberapa pendapat para ahli dari berbagai aliran dan paham mengenai pandangan berlakunya hukum bahwa penerapan yang paling ideal dalam kehidupan modern seperti sekarang ini norma hukum dianggap efektif apabila hukum tersebut dapat diterima dan ditaati oleh masyarakat dan harus dengan adanya sanksi-sanksi yang tegas untuk bisa mengatur dan memberikan ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat.

Sebenarnya dalam kewajiban Notaris ada 4 (empat) jenis sanksi, sesuai dengan Pasal 16 ayat 11 Undang-undang Jabatan Notaris yaitu:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi peringatan tertulis merupakan awal untuk menjatuhkan sanksi terhadap Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya apabila tidak melakukan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas jabatan kerja Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, jika sanksi tersebut tidak dipatuhi oleh Notaris yang bersangkutan, maka bisa dijatuhi sanksi yang berikutnya secara berjenjang.²³

Sanksi peringatan tertulis bukanlah sanksi administratif, hal ini bisa dilihat dengan menggunakan parameter jenis sanksi administratif yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon dan H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt, yaitu :

- a. Paksaan Pemerintah (*bestuurdwang*)

Paksaan pemerintah sebagai tindakan-tindakan yang nyata (*feiteijke handeling*) dari penguasa guna mengakhiri suatu keadaan yang dilarang oleh suatu kaidah hukum administrasi atau (bila masih) melakukan apa yang seharusnya ditinggalkan oleh para warga negara karena bertentangan dengan undang-undang.

- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)

²³ Habib Adjie, *Op. Cit.* hlm 114.

Sanksi yang digunakan dengan mencabut atau menarik kembali suatu keputusan atau ketetapan yang menguntungkan, dengan mengeluarkan ketetapan baru. Sanksi seperti ini diterapkan dalam hal terjadi pelanggaran terhadap peraturan atau syarat-syarat yang dilekatkan pada penetapan tertulis yang telah diberikan, juga terjadi pelanggaran undang-undang yang berkaitan dengan izin yang dipegang oleh si pelanggar.

Pencabutan atau penarikan yang menguntungkan merupakan suatu sanksi situatif, yaitu sanksi yang dikeluarkan bukan dengan maksud sebagai reaksi terhadap perbuatan yang tercela dari segi moral, melainkan dimaksudkan untuk mengakhiri keadaan-keadaan yang secara objektif tidak dapat dibenarkan lagi.

c. Pengenaan denda administratif

Sanksi pengenaan denda administratif ditujukan kepada mereka yang melanggar peraturan perundang-undangan tertentu, dan kepada sipelanggar dikenakan sejumlah uang tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, kepada pemerintah diberikan wewenang untuk menerapkan sanksi tersebut.

d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Sanksi pengenaan uang paksa oleh pemerintah ditujukan untuk menambah hukuman yang pasti, disamping denda yang telah disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.²⁴

Sanksi-sanksi yang bisa dikategorikan ke dalam jenis sanksi administratif, yaitu sanksi pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi seperti ini dapat dikategorikan sebagai penarikan kembali keputusan-keputusan yang menguntungkan. Sedangkan sanksi

²⁴ *Ibid.* hlm. 108.

berupa peringatan tertulis dapat dikategorikan sebagai salah satu prosedur paksaan nyata (*bestuurdwang*).²⁵

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :²⁶

1. Sanksi Reparatif

Sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya, paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

2. Sanksi Punitif;

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.

3. Sanksi Regresif;

Sanksi sebagai reaksi atau ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

Dari ketiga sanksi administratif tersebut semua nya dapat diterapkan pada Notaris yang berpraktik dalam menjalankan tugas dan jabatannya termasuk mengenai kewajiban Notaris menerima calon Notaris magang guna meningkatkan kompetensi calon Notaris.

2. Struktur/Penegak Hukum

Mengenai kewajiban Notaris menerima calon Notaris magang, campur tangan pemerintah dan Organisasi Notaris sangat diperlukan agar

²⁵ *Ibid.*, hlm 10.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 106-107.

penolakan terhadap calon Notaris magang yang selama ini dilakukan oleh beberapa Notaris berpraktik di kota Batu bisa dihindari demi menjaga eksistensi dunia kenotariatan dan melahirkan para Notaris yang handal, beretika dan profesional.

Menerima calon Notaris magang merupakan kewajiban bagi seorang Notaris praktik, tetapi dalam hal-hal tertentu seorang Notaris juga bisa menolak untuk menerima calon Notaris magang dengan alasan-alasan, seperti:²⁷

1. Kantor Notaris tidak banyak bisa menampung calon notaris magang/masalah tempat.
2. Calon Notaris magang tidak bisa menjaga rahasia kantor tempat calon Notaris magang, sehingga banyak hal seharusnya menjadi tanggung jawab Notaris untuk menjaga kerahasiaan akta tetapi malah disebarkan oleh calon Notaris magang.
3. Adanya pencurian data yang dilakukan oleh Calon Notaris magang
4. Banyak calon Notaris yang meminta untuk digaji padahal masih dalam proses magang.

Itta Andrijani selaku Ketua Ikatan Notaris Indonesia daerah Malang sependapat mengenai alasan-alasan penolakan mengenai calon notaris magang tersebut diatas karena memang alasan tersebut sudah sering kali dilakukan oleh para Notaris, bahkan dalam praktiknya selama ini Ikatan Notaris Indonesia tidak pernah mendapat laporan tentang penolakan yang dilakukan oleh Notaris praktik di Kota Batu walaupun sebenarnya diketahui bahwa banyak Notaris yang tidak menerima calon Notaris magang, sehingga sampai saat ini tidak pernah ada penerapan sanksi mengenai pelanggaran yang berkaitan dengan penolakan calon notaris magang.²⁸

Mengefektifkan suatu hukum dalam masyarakat harus dapat dipaksakan dengan adanya sanksi-sanksi yang tegas atau bila perlu harus

²⁷ Hasil wawancara Siti Noer Endah (Ketua Majelis Pengawas Daerah Malang), tanggal 15 Juli 2014) data primer diolah.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Itta Andrijani (Ketua Ikatan Notaris Indonesia Daerah Malang), tanggal 16 Juli 2014 data primer diolah

ada campur tangan pemerintah, karena setiap negara menjamin hak-hak tertentu setiap warganya, dan setiap warga negara mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu tunduk pada hukum yang berlaku dalam suatu negara, jadi ada timbal balik antara negara dan warga negara, hal ini dilakukan agar keteraturan yang diharapkan dalam hukum bisa berjalan dengan baik

3. Budaya Hukum/Kebiasaan.

Kebiasaan yang terjadi dalam hal penegakan mengenai penolakan terhadap calon Notaris magang di kantor Notaris praktik padahal merupakan kewajiban Notaris untuk menerima Notaris magang di kantornya baik atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi Notaris hampir tidak ada penegakan yang dilakukan oleh organisasi Notaris, dan karena tidak adanya sanksi yang tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan Notaris mengenai penolakan terhadap calon Notaris magang, sehingga menjadi suatu kebiasaan untuk menolak calon Notaris

Penolakan terhadap calon notaris magang sering terjadi dalam praktik terutama di Kota Batu, banyak sekali terjadi penolakan terhadap calon Notaris magang dikarenakan alasan seperti, akta yang dibuat tidak terlalu banyak dengan kata lain bahwa di kantor notaris tersebut sepi atau dengan alasan bahwa kantor tempat Notaris berpraktik tidak cukup untuk menampung calon Notaris magang terlepas dari alasan-alasan tersebut perlu diketahui pula bahwa rata-rata calon notaris magang pada saat akan magang di kantor notaris selalu atas prakarsa sendiri, jadi jarang sekali calon notaris magang meminta rekomendasi dari organisasi notaris sehingga calon notaris kebingungan pada saat ada penolakan terhadap penerimaan calon notaris magang mereka harus melapor kemana.²⁹

Kewajiban menerima magang calon notaris tidak disebutkan adanya sanksi secara tegas yang akan diterima oleh Notaris jika tidak melaksanakannya, namun secara tersirat ada sanksi yang dijatuhkan berupa sanksi moral. Artinya seorang Notaris yang disebut sebagai pejabat negara

²⁹ Hasil wawancara dengan Khalid Saleh Bahmid (Calon Notaris Magang), tanggal 19 Juli 2014 data primer diolah

seyogyanya bersedia memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya baik dengan atau tanpa uang jasa (honorarium). Selain itu, bagi notaris yang menolak menerima magang calon notaris, dikalangan notaris akan diaanggap tidak patuh atau melanggar pasal 16 ayat 1 huruf m Undang-undang Jabatan Notaris dan pasal 3 huruf p Kode Etik Notaris.

Simpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan Pasal 16 Ayat (1) Huruf n Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa salah satu kewajiban Notaris adalah menerima magang calon Notaris, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Pasal 16 ayat 1 (satu) huruf n Undang-Undang Jabatan Notaris tidak efektif penerapannya khususnya dalam penerimaan magang calon Notaris di kota Batu dikarenakan masih banyak terjadi penolakan terhadap calon Notaris magang di Kota Batu sehingga secara tidak langsung telah menghentikan eksistensi lahirnya Notaris baru.

Ada beberapa faktor penghambat atas pelaksanaan pasal yang berkaitan dengan kewajiban penerimaan calon Notaris magang, yaitu :

1. Faktor substansi/peraturan perundang-undangan
Tidak dipatuhi nya Undang-Undang Jabatan Notaris oleh Notaris yang berpraktik di Kota Batu karena tidak adanya sanksi yang tegas.
2. Faktor struktur/penegak hukum
Kurang tegasnya Organisasi dalam menindak para Notaris yang melakukan penolakan terhadap calon Notaris magang di Kota Batu.
3. Faktor budaya/kebiasaan
Karena sudah menjadi suatu yang biasa menolak calon Notaris magang di kantor notaris, dan karena sanksi yang diberikan tidak terlalu berat.
2. Sanksi yang diberikan oleh majelis pengawas daerah (MPD) kepada notaris yang tidak menerima calon notaris magang.

Dalam kewajiban Notaris ada 4 (empat) jenis sanksi sesuai dengan Pasal 16 ayat 11 Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 yaitu :

- a. Peringatan tertulis;

- b. Pemberhentian sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Secara garis besar sanksi administratif dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Sanksi Reparatif

Sanksi yang ditujukan untuk perbaikan atas pelanggaran tata tertib hukum. Dapat berupa penghentian perbuatan terlarang, kewajiban perubahan sikap/tindakan sehingga tercapai keadaan semula yang ditentukan, tindakan memperbaiki sesuatu yang berlawanan dengan aturan. Contohnya, paksaan untuk berbuat sesuatu untuk pemerintah dan pembayaran uang paksa yang ditentukan sebagai hukuman.

2. Sanksi Punitif;

Sanksi yang bersifat menghukum, merupakan beban tambahan. Sanksi hukuman tergolong dalam pembalasan, dan tindakan preventif yang menimbulkan ketakutan kepada pelanggar yang sama atau mungkin untuk pelanggar-pelanggar lainnya. Contohnya pembayaran denda kepada pemerintah, teguran keras.

3. Sanksi Regresif;

Sanksi sebagai reaksi atau ketidaktaatan, dicabutnya hak atas sesuatu yang diputuskan menurut hukum, seolah-olah dikembalikan kepada keadaan hukum yang sebenarnya sebelum keputusan diambil. Contohnya pencabutan, perubahan atau penangguhan suatu keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Bambang Sunggono, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Edisi Keempat, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- H.R. Otje Salman & Anthon F. Susanto, **Beberapa Aspek Sosiologi Hukum**, Bandung; PT. ALUMNI, 2012.
- Habib Adjie, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris**, Bandung: Refika Aditama: 2011.
- Habib Adjie, **Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)**, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009.
- Habib Adjie, **Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik**, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Husni Thamrin, **Pembuatan Akta Pertanahan Oleh Notaris**, Yogyakarta, LaksBang Pressindo, 2011.
- Ira Koesoemawati, Yunirman Rijan, **Ke Notaris**, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2009.
- Munir Fuady, **Sosiologi Hukum Kontemporer, sosiologi hukum, kekuasaan, dan Masyarakat**, Bandung, PT. Citra Aditya Abadi, 2007.
- Munir Fuady, **Teori-teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum**, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, **Jati Diri Ikatan Notaris Indonesia**, Jakarta, Gramedia Pustaka, 2009.
- Ridwan HR, **Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi**, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Setiawan Widagdo, **Kamus Hukum**, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisir, 2012.

Sjaifurrachman, **Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta**, Bandung; Mandar Maju, 2011.

Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Peraturan Perundang-Undangan

Soedharyo Soimin, 1995, **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**, Sinar Grafika, Jakarta.

Karya Gemilang, 2009, **Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Jabatan Notaris dan PPAT**, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.

Internet

www.hukumonline.com/calon-notaris-wajib-magang-bersama,

www.batukota.bps.go.id,

www.ahu.web.id/formasi-notaris,